



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 913/IV/VI/2016



**Buka Puasa Bersama Presiden,
Ketua DPR RI Serukan Pentingnya Pluralisme**

**Komisi VII DPR RI Setujui APBNP 2016
Kementerian ESDM**

**Komisi III DPR RI Apresiasi Kesederhanaan
Keluarga Tito Karnavian**

GRATIS

Tidak Diperjualbelikan



Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama Presiden RI di Kompleks Widya Chandra

Buka Puasa Bersama Presiden, Ketua DPR RI Serukan Pentingnya Pluralisme

Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan pentingnya pluralisme dalam menjalankan ritual keagamaan. Hal itu disampaikan saat melakukan buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan Senin, (21/06).

Ia menjelaskan bahwa momentum Ramadhan mengingatkan dirinya pada sosok cendekiawan sekaligus gurunya yakni Cak Nur atau Nurcholis Madjid. Politisi Golkar ini mencurahkan bahwa sosok Cak Nur selalu mengingatkan hikmah ibadah puasa adalah sebagai ujian dalam melaksanakan kewajiban.

"Beliau sering menceritakan pada kami bahwa salah satu hikmah ibadah puasa adalah ujian dalam melaksanakan kewajiban. Yang puasa menghormati yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa menghormati yang puasa," tutur Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Dalam kesempatan ini, Akom menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengakui pluralisme, sehingga penting bagi umat Islam untuk mampu bersikap adil kepada siapapun, tidak mendiskreditkan satu golongan tertentu

yang berbeda darinya.

"Islam adalah agama yang mengakui pluralisme, pluralis akan membawa keadilan sosial. Islam mengajak kita untuk adil sejak dalam pikiran dan tidak boleh mendiskreditkan satu golongan atas golongan yang lain," papar Akom.

Menjelang momen Idul Fitri ini, Akom juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk saling menghormati dalam penentuan 1 Syawal yang kerap berbeda antar kelompok, sehingga kehidupan beragama masyarakat Indonesia bisa lebih damai dan toleran terhadap perbedaan.

"Sebentar lagi Menteri Agama akan diuji dalam menentukan 1 Syawal, mudah-mudahan sama, tapi jika tidak sama, maka kita sedang diuji lagi kadar pluralisme-nya," jelas Akom.

Alumnus UIN Jakarta ini juga

menegaskan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang toleran secara historis, karena dalam penyebarannya dilakukan melalui pendekatan budaya oleh Walisongo. "Kita harus menghormati kelompok yang menentukan 1 Syawal berbeda dengan pemerintah. Islam Indonesia adalah Islam yang toleran secara historis seperti Walisongo yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya." tegasnya.

Akom menuturkan hal itu sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika, begitu pula para pendahulu yang sepakat Pancasila dan UUD 1945 dijadikan dasar negara. "Pendahulu kita sepakat menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan semua orang berhak atas kebebasan menjalankan keyakinan," pungkasnya. ■

Songsong Idul Fitri, Ketua DPR RI Targetkan Penyelesaian Tiga Agenda Penting

Menyongsong hari raya kemenangan Idul Fitri 1437, Ketua DPR RI Ade Komarudin menargetkan untuk merampungkan tiga agenda penting kenegaraan. Ketiganya adalah, RUU Pengampunan Pajak, Pengesahan Calon Kepala Kepolisian RI dan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan Perppu Kebiri.

Pengesahan itu disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para petinggi negara lainnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Jaksa Agung, dan beberapa tamu penting lainnya saat buka puasa bersama dan silaturahmi di rumah dinas Ketua DPR RI di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (20/6).

"Jelang tanggal 28 Juni 2016 mengakhiri masa sidang untuk memasuki cuti panjang, insya Allah kami bisa selesaikan RUU Tax Amnesty, insya Allah 7 pasal lagi bisa diselesaikan," kata Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI.

Bahkan Akom menjanjikan pembahasan UU Pengampunan Pajak akan selesai sebelum tanggal 28 Juni 2016, sehingga bisa disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Seperti diketahui, pemerintah telah menegaskan bahwa pembahasan RUU Pengampunan Pajak penting diselesaikan sebelum pengajuan APBNP

2016, karena penerimaan dari pengampunan pajak akan dimasukkan dalam RAPBNP 2016.

Berkenaan dengan pergantian Kapolri, Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Komisi III DPR RI akan segera mengambil keputusan sebelum lebaran. Akom menjelaskan rencananya Rabu (22/6) akan melakukan fit and proper test.

"Tidak baik menunda pekerjaan seperti Pak JK (Jusuf Kalla) bilang, i k a n s e p a t i k a n g a b u s , l e b i h c e p a t l e b i h

bagus," papar Akom dengan pantunnya.

Akom menargetkan pada pekan ini DPR RI sudah mengesahkan Kapolri baru, rencananya pada 23 Juni. Ini menunjukkan kesungguhan DPR RI dalam memproses pergantian Kapolri Badrodin Haiti. "Pokoknya pekan ini selesai," tandas Akom.

Penunjukan calon Kapolri tunggal yakni Komisar Jendral (Pol) Tito Karnavian diceritakan Akom kepada Presiden saat rapat Badan Musyawarah. "Tadi bahkan rapat Bamus yang membahas penunjukan Pak Tito hanya berlangsung 15 menit, jadi kami pastikan semua tadi bisa selesai sebelum masa libur yang dimulai pada 28 Juni nanti," ungkap Akom.

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat VII ini juga berjanji, DPR RI akan segera menyelesaikan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Kami akan memproses Perppu Kebiri, sedang kami proses di Komisi VIII, secepatnya akan segera selesai," lanjut Akom. ■



Ketua DPR RI Ade Komarudin



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR -RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

[ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Manfaatkan Buka Puasa Bersama, Agus Hermanto Laporkan Kegiatan Pengawasan

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyelenggarakan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan awak media dan jajaran Pejabat Setjen DPR RI. Dalam acara ini, sambil menunggu azan magrib dia menyampaikan kegiatan pengawasan kinerja pemerintah menghadapi bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Dia melaporkan pemantauan yang dia lakukan dalam kategori ekonomi dan transportasi. "Saya ingin menyampaikan laporan yang telah saya lakukan selama Ramadhan ini," ungkap Agus saat memberi sambutan menjelang buka puasa, di Nusantara III, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/6).

Dalam kategori ekonomi ia melakukan kunjungan serta pengawasan di pasar-pasar tradisional, salah satunya di daerah Bekasi Jawa Barat. Dirinya menilai harga daging belum stabil, dan kenaikan harga tidak sesuai yang direncanakan pemerintah. Adapun untuk komoditas pangan lainnya masih dianggap normal.

"Untuk masalah daging sapi masih belum sesuai harapan pak Jokowi. Kami mendorong pemerintah untuk menurunkan harga daging," ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat.

Selain pasar tradisional Agus yang



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam acara buka puasa bersama dengan awak media dan para pejabat Setjen DPR RI

sering mendampingi Ketua DPR RI Ade Komarudin, juga meninjau ketersediaan bahan pokok di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini, mengharapkan ketersediaan bahan pokok harus selalu terjamin.

Sedangkan dalam kategori transportasi, untuk menghadapi mudik lebaran. Agus bersama Ketua DPR RI telah mengunjungi Stasiun Gambir dan Senen serta Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri).

Pemantauan ini untuk mengecek langsung segala macam kesiapan infrastruktur transportasi menghadapi mudik lebaran.

umum dia menilai, sampai saat ini kesiapan menghadapi mudik lebaran sudah cukup. Namun dia mengingatkan aparat untuk mengantisipasi adanya pasar tumpah di jalur-jalur mudik. "Sektor transportasi ini persiapan baik dan cukup," papar Agus.

Anggota dewan dari dapil Jawa Tengah I ini juga berterimakasih dan mengapresiasi rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan buka puasa bersama. "Saya bersyukur bisa silaturahmi dan buka puasa bersama dengan rekan media dan Sekjen," ungkap Agus. ■

(foto), Foto: Azka/br

Ketua DPR RI Buka Puasa Bersama Mitra Komisi XI

Dalam rangka menjalin silaturahmi, Ketua DPR RI Ade Komarudin menggelar acara buka puasa bersama seluruh mitra kerjanya terdahulu di Komisi XI. Acara yang dimulai pukul 17.30 WIB tersebut dilaksanakan di Rumah Dinas Ketua DPR RI di Komplek Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (17/06) sore.



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama mitra kerja Komisi XI

Hadir dalam acara ini Pejabat Kementerian Keuangan, seluruh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Direksi Perbankan.

terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari berbagai kalangan," ujar Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, saat membuka acara tersebut.

Menurut Akom, acara buka puasa ini merupakan salah satu kesempatan yang bagus untuk menjalin silaturahmi dengan rekan kerjanya, mengingat sudah selama 19 tahun ia mengemban tugas

"Kami sekeluarga, saya dan istri beserta anak-anak saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari berbagai kalangan," ujar Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, saat membuka acara tersebut.

Menurut Akom, acara buka puasa ini

merupakan salah satu kesempatan yang bagus untuk menjalin silaturahmi dengan rekan kerjanya, mengingat sudah selama 19 tahun ia mengemban tugas dan amanah sebagai wakil rakyat.

"Semua yang hadir teman saya, tidak

ada hubungan dagang atau kekuasaan tetapi berteman karena saya di DPR RI sudah dari tahun 1997," tutur Akom.

Acara berlangsung dengan sederhana dan penuh suasana keakraban tersebut ditutup dengan sholat Isya dan Tarawih. ■

(ammrnp), foto: jayadi/br

Angkat Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Bung Hatta: Fadli Zon Raih Doktor Ilmu Sejarah UI

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meraih predikat sangat memuaskan dalam sidang promosi Doktor di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok. Fadli Zon menjadi Doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) dengan tema disertasi "Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1926 - 1959".

Gelar itu diperoleh setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1956)" dalam sidang yang dipimpin Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Andrianus Woworuntu. Fadli berhasil menjawab pertanyaan pengujian dan mempertahankan disertasi serta meraih nilai (yudisium)

'sangat memuaskan', di Auditorium Pusat Studi Jepang, kampus UI Depok, Senin sore (20/6).

Bertindak sebagai Ko-Promotor adalah Prof Susanto Zuhdi. Para pengujian antara lain Dr Abdurakhman, Prof Dr Maswadi Rauf, Prof Dr Bambang Wibawarta, Dr Revisond Baswir, Dr Masyhuri, Yon Machmudi PhD dan Dr Linda Sunarti. Sedang Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Dr Andrianus Woworuntu bertindak pemimpin sidang promosi doktor Fadli Zon itu. Acara sidang dimulai sekitar pukul 16.00 dan berakhir menjelang saat buka puasa.

"Setelah mempertimbangkan pendapat dari promotor dan ketua program studi terkait perkembangan keilmuan saudara, berdasarkan itu tim pengujian mengangkat saudara sebagai doktor ilmu sejarah dengan yudisium sangat memuaskan," kata Andrianus dalam sidang doctoral Fadli Zon.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersalaman dengan tim pengujian disertasi di FIB UI

Promotor doctoral Fadli Zon, Muhammad Iskandar mengatakan studi strata 3 telah ditempuh sejak politisi itu belum menjadi anggota DPR RI dan menghabiskan masa waktu pendidikan maksimal. "Sebenarnya bisa cum laude tapi karena ditempuh dengan waktu maksimal, 12 semester, maka dianggap tidak berhak," kata Iskandar.

Fadli mengatakan dari kekagumannya terhadap pemikiran-pemikiran Bung Hatta dia menilai gagasan ekonomi kerakyatannya masih relevan untuk diterapkan pada masa ini. Menurutnya Bung Hatta memandang bagaimana rakyat menjadi pusat ekonomi atau *people center economy*. Bukan sekedar pembangunan, infrastruktur tetapi bagaimana ekonomi rakyat meningkatkan gagasan ekonomi.

Ia menilai Bung Hatta dibesarkan secara demokratis dan religius, peduli nasib rakyat. Dengan kental tradisi budaya Minangkabau, gagasan Bung Hatta banyak

sekali mengaplikasikan satu *local wisdom* sendiri. Saat menjelaskan dalam sidangnya Fadli mengatakan aplikasi pemikiran Bung Hatta yang ada dalam masyarakat Minang adalah "Sakit di kita sakit juga di orang. Enak di kita, enak juga di orang. Samasama rasa, samasama sakit, samasama senang, samasama susah. Tradisi Minangkabau mempengaruhi Bung Hatta. Saya sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra juga banyak memperjuangkan pemikiran Bung Hatta dalam manifesto Partai Gerindra. Bukan semata-mata pada pemikiran gagasan," tegasnya.

Fadli menjelaskan seharusnya kita kembali kepada ekonomi rakyat dan memberdayakan rakyat. Kesenjangan sosial saat ini menurutnya semakin lebar. "Jadi rakyat yang menjadi tenaga utama ekonomi kita, bukan ekonomi untuk rakyat saja. Sehingga koperasi itu dibentuk sebagai usaha untuk menghimpun para anggotanya kemudian mereka berusaha dan menjalankan kegiatan ekonomi untuk kemakmuran. Tapi kita melihat koperasi kita tidak berjalan optimal, sedangkan di luar negeri koperasi berjalan dengan majunya. BUMN masih meminta penyertaan modal negara. BUMN harusnya menyumbangkan banyak dana untuk APBN.

Dalam sidang akademik itu tampak hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, keluarga Fadli Zon, dan keluarga Alm. Mohammad Hatta. Ketua BNPT Komjen Pol Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas juga hadir namun tidak sampai acara usai. ■

(Andri) Foto: Andri/br

Ketua DPR RI Kunjungi Korlantas Bahas Pengamanan Mudik Lebaran

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua Korinbang Agus Hermanto dan Anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi serta Bachrudin Nasori, melakukan kunjungan lapangan ke Markas Korlantas Polri dikawasan Jakarta Selatan.

Kehadiran Pimpinan DPR RI dan rombongan di sambut langsung oleh Kakorlantas Irjen. Pol. Agung Budi Maryoto dan jajarannya. Tujuan kunjungan pria yang akrab disapa Akom tersebut adalah untuk melihat secara langsung kesiapan Korlantas Polri dalam pengamanan lalu lintas jalur mudik Hari Raya Idul Fitri 1437 H.

"Saya ingin mendapatkan penjelasan langsung tentang perencanaan Korlantas untuk menghadapi lebaran tahun ini. DPR RI sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan fungsi pengawasan, kalau tidak mengetahui perencanaannya dari awal maka dikhawatirkan pada saat Polri rapat dengan Komisi III maka di anggap pekerjaannya hanya menyalahkan," ujar Akom disela-sela kunjungannya ke Markas Korlantas, Selasa (21/6).

Menurutnya, lebih baik kita mengetahui perencanaan dari awal, oleh



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima cenderamata dari Kakorlantas Irjen. Pol. Agung Budi Maryoto

karena itulah DPR RI melakukan kunjungan saat ini guna mendapatkan keterangan yang lebih komprehensif dari pihak Korlantas.

"Kami ingin tahu titik-titik mana yang

menjadi tempat rawan kemacetan yang menjadi masalah setiap tahun, dan kita juga ingin lihat semua perencanaan transportasi baik di udara, darat dan laut dalam menghadapi lebaran tahun ini," tegasnya.

Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh pihak Korlantas Polri tentang kesiapan jajarannya dalam mengantisipasi arus mudik dan arus balik lebaran, Akom menilai bahwa ada keseriusan kinerja dan peningkatan sistem ke arah yang lebih baik yang telah dilakukan oleh Korlantas.

"Setelah kita mendengarkan berbagai rencana kesiapan Korlantas dalam mengantisipasi peningkatan arus mudik Lebaran tahun ini, maka saya yakin akan ada peningkatan pengamanan yang lebih baik. Dan saya harapkan akan ada penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. ■

(depmp), Foto: Krenu/br

Ketua DPR RI Semakin Fokus Jalankan Tugas

Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan dirinya saat ini semakin fokus menjalankan tugas dan amanah sebagai Ketua DPR RI pasca musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Bali beberapa waktu lalu. Hal tersebut diungkapkannya saat buka puasa bersama Presiden Republik Indonesia ketiga, BJ Habibie, Fraksi Partai Golkar di DPR RI, SOKSI dan beberapa tokoh nasional lainnya di Kediaman Ketua DPR RI, Widya Chandra, Jakarta, Kamis (16/6).

“Terimakasih sudah berkenan hadir pada hari ini Abang kita semua, Bang Ical yang merupakan Ketua Dewan Pembina Golkar, para pengurus DPP, dewan pakar, SOKSI. Bapak Djan Faridz dari PPP dan tentu saja terimakasih untuk Bapak BJ Habibie. Alhamdulillah saat ini Partai Golkar tetap sejuk. Setelah

tidak terpilih menjadi Ketua umum, saat ini saya lebih fokus menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanahkan ke saya sebagai Ketua DPR RI," ujar Ade.

Dilanjutkan Akom, begitu kalangan wartawan biasa memanggilnya, meskipun dirinya menjalankan tugas sebagai Ketua DPR RI, namun tetap saja masyarakat



Ketua DPR RI Ade Komarudin

melihat dirinya sebagai kader dari partai berlambang pohon beringin itu. Termasuk ketika ia melakukan peninjauan kesiapan transportasi mudik Lebaran 2016 ke stasiun Gambir dan stasiun Senen beberapa waktu lalu.

Ia berharap partai yang dinaunginya itu tetap sejuk dalam masa mendatang. Pasalnya beberapa agenda politik masih harus

dipersiapkan Golkar di masa mendatang, yakni Pilkada serentak pada 2017 dan Pilpres 2019 mendatang.

"Saya khawatir jika Golkar tidak berhenti konflik dan segera melakukan konsolidasi, jangankan melakukan penggalangan, mengurus diri sendiri saja susah. Jadi saya berharap kita semua harus bekerja sama, pertarungan sudah

usai,"pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad menilai acara buka puasa bersama ini menjadi ajang yang baik untuk lebih mengeratkan tali silaturahmi baik sesama kader Golkar, maupun sesama anggota DPR RI. Lebih jauh bisa dimaknai sebagai sebuah konsolidasi nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia. ■

(Ayu), Foto: Rizka/hr

Fadli Zon Apresiasi Film "Papua: Mengungkap Sebuah Fakta"

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi film dokumenter 'Papua; Mengungkap Sebuah Fakta' yang diinisiasi oleh Jimmy Demianus Idjie. Hal itu disampaikan usai menjadi pembicara dalam peluncuran film dokumenter dan diskusi publik dengan tema 'Papua: Dulu, Kini dan Esok' di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa, (21/06).

“ Ini adalah satu optimisme terhadap apa yang terjadi di Papua, karena kalau 1 foto aja bisa mendapatkan 1000 kata, maka film ini bisa 1 juta kata. Saya sambut baik film yang diinisiasi oleh Jimmy Demianus Idjie ini,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini juga menaruh harapan agar film ini bisa ditonton oleh masyarakat dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia saja. "Mudah-mudahan film ini bisa ditonton oleh bukan hanya masyarakat Indonesia saja tapi juga masyarakat dunia. Sehingga bisa melihat realitas yang ada di Papua dulu dan kini," tuturnya.

Terkait Otsus Papua, Fadli yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otsus Papua, Aceh, dan DIY Yogyakarta DPR RI ini juga optimis terhadap pembangunan di Papua, dan untuk mencapai target pembangunan masih diperlukan waktu.

"Ya Otsus sudah berjalan sejak 2001, kini memasuki 15 tahun ya. Sudah banyak



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam acara peluncuran film dokumenter dan diskusi publik tentang Papua

yang dilakukan untuk memberikan *affirmative action* di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur. Saya kira masih cukup optimis, ini kan masih berlaku sekitar 10 tahun lagi," jelasnya.

Ia juga merespon beberapa kritik yang ditujukan terhadap realisasi dari UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang belum optimal. Fadli mendorong agar hal itu diperbaiki dan dievaluasi, bahkan jika perlu dilakukan

revisi terhadap UU tersebut.

"Meskipun ada juga kritik bahwa UU itu belum terealisasi dengan baik, termasuk dana Otsus yang belum maksimal sampai pada tujuannya. Ini yang saya kira perlu diperbaiki. Oleh karenanya perlu ada evaluasi dan jika diperlukan adalah revisi terhadap UU Otsus tersebut," terangnya.

Ketua DPD RI Irman Gusman yang juga bertindak sebagai pembicara mengatakan D P D a k a n

mengoptimalkan perannya dalam perjuangan di Papua. Menurutnya, DPD merupakan pelengkap untuk membangun Indonesia sejahtera. Ia menjelaskan bahwa persoalan Papua bukan saja di permasalahan anggaran, tapi juga bagaimana pengelolaannya.

"Di Papua bukan permasalahan anggaran dalam bentuk uang, tapi bagaimana pengelolaannya. Terutama dalam pengelolaan perencanaan sehingga bisa membangun Papua," kata Irman. ■

(bs.rsp), Foto: Hamis/br

Ketua DPR RI: Sosok Tito Karnavian Berprestasi dan Sudah Teruji

Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai bahwa Komjen Pol. Tito Karnavian adalah sosok yang sangat berprestasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa di dalam Institusi Kepolisian.

“ Saya sudah bertemu dengan pak Tito, dan saya juga tahu *track record* nya. Beliau adalah orang yang sangat berprestasi di kepolisian, dan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman penempatan dinas yang luar biasa,” ujar Ade Komarudin di depan ruang rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Menurut pria yang biasa disapa Akom tersebut, sosok Tito merupakan seorang polisi yang berprestasi, karena memiliki segudang prestasi. Tidak hanya dari segi akademis tapi juga dari sejumlah promosi jabatan dan kenaikan pangkat luar biasa semasa bertugas di kepolisian.



Pimpinan DPR RI usai mengikuti Rapat Paripurna

"Beliau sudah sangat teruji di berbagai tempat dan selalu berprestasi, Jadi tidak ada keraguan sedikitpun dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada beliau dalam berbagai segi," tandasnya.

Akom juga mengatakan bahwa Insya Allah mayoritas fraksi di DPR RI akan menyetujui jika Komjen Pol. Tito Karnavian ditunjuk sebagai Kapolri. Karena dengan reputasi yang dimiliki, Tito dipercaya bisa melakukan pembenahan dan reformasi di dalam tubuh Polri dengan di dukung oleh seluruh jajaran yang ada.

Seperti diketahui, Ketua DPR RI telah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait pergantian calon Kapolri baru. Dan dalam surat itu pula, Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. ■

(dep.mp). Foto: Iwan/hr

RUU Pengelolaan Kebudayaan Diharapkan Lestarikan Adat Bangsa Indonesia

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kebudayaan bisa menjaga dari hal-hal yang sifatnya plural, masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam, serta dapat melestarikan adat bangsa Indonesia sebagai ciri khas etnik masing-masing pribadi Indonesia.

“ Hadirnya RUU tentang Pengelolaan Kebudayaan ini kami sangat setuju dan harapan kami bisa menjaga hal-hal yang sifatnya plural, masyarakat yang majemuk dan keberagaman, termasuk memelihara adat sebagai ciri khas etnik masing-masing pribadi Indonesia,” kata Gubernur Sumbar Iwan Prayitno saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Jumat (17/06)

Dalam pertemuan dengan Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X guna

mendapatkan masukan mengenai materi RUU Kebudayaan tersebut, Iwan Prayitno mengusulkan judul RUU menjadi RUU tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Menurutnya, definisi kebudayaan itu sangat luas, sulit untuk dikerucutkan dan dirumuskan definisinya. Substansi pengelolaan, tandasnya, lebih mudah diatur dan lebih jelas indikator secara kuantitatif.

"Kebudayaan lebih banyak kualitasnya untuk diungkapkan, kuatir tidak melengkapai dan tidak mengcover seluruh makna kebudayaan. Daripada ribut untuk menkonkritkan konsep

kebudayaan secara utuh sesuai dengan pikiran para budayawan, mungkin lebih bagus bila berkembang sebagai bentuk *exercise* diskusi tetap terjadi pada kebudayaan, tetapi kalau pengelolaan jelas indikatornya," terangnya.

Ia berpendapat, RUU tentang Kebudayaan seharusnya secara substantif dapat mengelaborasi nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama tumbuh dan berkembang di lingkungan masing-masing masyarakat adat pada setiap wilayah di tanah air.

Sementara mengenai implikasi kebudayaan Indonesia dalam kehidupan

bangsa Indonesia khususnya dalam masyarakat adat, Iwan menyatakan, adanya RUU Pengelolaan Kebudayaan ini, masyarakat adat yang sudah ada sejak lama bisa mendapatkan perlindungan dan pelestarian.

"Ini juga sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 18 yang memberikan suatu kesempatan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan adat dan ciri khasnya masing-masing. Sehingga UU ini tentunya memberikan peluang keberagaman untuk tetap terpeliharanya dan dilindungi.

Dengan demikian pelestarian adalah merupakan upaya dinamis berbagai pihak meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan," papar Iwan.

Selanjutnya ia menyatakan, bahwa dengan adanya RUU Pengelolaan Kebudayaan ini, negara secara hukum dan kultural mengakui keberadaan, beragaman dan kemajemukan Desa Adat tersebut, mengakui keberadaannya komunitas budaya tersebut.

Menjawab pertanyaan Komisi X DPR RI mengenai bagaimana implementasinya, Iwan dengan tegas menyatakan bahwa



Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih

implementasi RUU Pengelolaan Kebudayaan diharapkan mampu lebih memotivasi. "Jadi harapan kita, melindungi, melestarikan dan memotivasi keberagaman dalam bentuk aktivitas budaya di daerah yang dilakukan oleh Masyarakat Adat, Desa Adat, dan Komunitas Budaya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga menginformasikan bahwa komunitas budaya di Sumbar yang mendapatkan bantuan melalui FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) sejak 2012 sampai dengan 2015, berjumlah 79

Komunitas Budaya. "Tahun 2016 ini, direncanakan ada sekitar 21 Komunitas Budaya lagi yang akan dibantu dengan besaran antara Rp 100 juta-Rp 150 Juta," ungkapnya.

Sementara, jumlah komunitas budaya di Sumbar sekitar 200 komunitas, jumlah Desa Adat yang telah direvitalisasi tahun 2015 berjumlah 9, dan tahun 2016 akan direvitalisasi lagi 6 Desa Adat (Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung, dan Tanah Datar).

Dan Masyarakat Adat di Sumbar ada 2, yakni Masyarakat Adat Minangkabau dan Masyarakat Adat Mentawai. Pengelolaan dan Pengaturan Masyarakat Adat yang ada di Sumbar sampai saat ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Kemendikbud, melalui UPT Kemendikbud BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) maupun Pelestarian cagar Budaya berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait, seperti Disdikbud, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. ■

(s). Foto: Sula/br

Komisi VII DPR RI Setujui APBNP 2016 Kementerian ESDM

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Fadel Muhammad dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Sudirman Said menyetujui APBNP 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).



Pimpinan Komisi VII DPR RI saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM

“Komisi VII DPR RI menyetujui perubahan APBN 2016 menjadi APBNP 2016 Kementerian ESDM yang sebelumnya Rp 8.345,75 miliar menjadi Rp 7.741,8 miliar,” kata Fadel saat membacakan kesimpulan rapat

kerja tersebut di Ruang Rapat Komisi VII Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/06).

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang membahas RKP dan RKA/K-L APBN Tahun 2017 ini, juga menyepakati asumsi dasar makro sektor ESDM untuk RAPBN 2017, antara lain harga minyak mentah (*Indonesia Crude Price/ICP*) dalam kisaran angka 45 - 55 US \$/Barrel dan Lifting Migas dalam kisaran 1.910 - 2.300 Ribu BOEPD (*Barrels of Oil Equivalent Per Day*). ■

(s). Foto: Arif/br

Perlu Kesadaran Bersama Selesaikan RUU Minol

Meski pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR RI tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan.

Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Achmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat (17/6) di Jakarta. Alasan DPR RI, dengan memakai judul larangan karena mengacu UU tentang Tata Cara Penyusunan UU bahwa hal itu dimungkinkan.

Selain itu sudah ada padanan, yaitu UU No.5/2003 yaitu UU Larangan Persaingan Usaha. "Sikap pemerintah tetap keukeuh, tidak mau judul tersebut, sebab asumsinya dengan larangan berarti telah meniadakan semuanya," ujarnya.

Sikap DPR RI khususnya FPP sebagai pengusul RUU ini, kata Mustakim, meski judulnya larangan, tetapi tetap ada pengecualiannya. Diantaranya terkait pariwisata, adat istiadat juga upacara keagamaan tertentu.



Anggota Pansus RUU Minol Achmad Mustaqim

Sejauh ini lanjut dia, dari perdebatan panjang akhirnya ada kesepakatan bahwa pembahasan RUU mengesampingkan judul, dan masuk ke pembahasan batang tubuh. Dari 164 DIM, telah dibahas 35 DIM dan normalnya pembahasan RUU dua masa sidang. Tapi jika dilihat waktu efektif tinggal dua pekan sebelum libur lebaran maka kemungkinan bisa tiga masa

sidang.

Melihat kondisi ini, Mustaqim berharap kita harus punya kesadaran bersama untuk segera menyelesaikan RUU ini, apalagi masuk dalam daftar RUU Prioritas. Ditegaskan, terjadi pelecehan seksual akhir-akhir ini selalu dilakukan habis mabuk. Apakah sumbernya karena minuman beralkohol (minol) atau non alkohol, itu berawal dari minuman keras.

"Kita harus menggugah semua pemangku kepentingan bahwa sudah harus melakukan pelarangan pada titik tertentu untuk bisa mereduksi resiko-resiko yang lebih lanjut bagi generasi muda. Masa depan Indonesia sangat tergantung seberapa jauh kita membuat UU dimana generasi muda bisa berdiri tegak di luar ketergantungan terhadap miras dan minol. Karena itu sudah waktunya Indonesia menerapkan pelarangan meski ada ruang pengecualian," ia menambahkan. ■

(mp), Foto: Kresna/Inf



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau ketersediaan pangan di Pasar Kramat Jati

Komisi IV Tinjau Ketersediaan Pangan di Pasar Kramat Jati

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI, Senin (21/6) berkesempatan meninjau pasar Kramat Jati, Jakarta, guna memantau ketersediaan bahan pangan yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan menjelang hari raya Idul Fitri tahun 1437 hijriyah.

Komisi III Dorong Operasi Ramadnya 2016 Lebih Matang

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, banyak hal menarik yang ingin disampaikan terkait kunjungannya ke markas Korlantas Polri di kawasan Jakarta Selatan.

Menurut Aboe Bakar, salah satu diantaranya adalah bila sudah menyangkut hari raya, Korlantas akan memegang peran kerja yang lebih besar. Ia juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi hari raya dan perayaan hari besar lainnya, kerap kali tersiar kabar peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian dengan jumlah yang signifikan, bahkan terkadang melebihi dari pada kasus terorisme.

Oleh karena itu ia mendorong agar kebijakan langkah dalam rencana operasi pengamanan arus mudik lebaran tahun 2016 yang bernama Operasi Ramadnya, yang akan dilakukan oleh Korlantas Polri dalam mengatasi serta mengantisipasi masalah arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1437 H supaya lebih matang dalam perencanaannya.

"Semoga dengan perencanaan operasional yang matang dan mendapat atensi yang besar dari Ketua DPR RI, Korlantas dapat mengantisipasi dan mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas saat mudik Lebaran

tahun ini," ujar Aboe Bakar Alhabsyi di Ruang NTMC Polri, Korlantas, Jakarta, Selasa (21/6).

Selain itu, penyebaran informasi yang dilakukan Korlantas melalui berbagai media sosial online seperti twitter, serta penyampaian informasi suasana lalu lintas di beberapa stasiun TV secara live, dan di presentasikan oleh anggota Korps Polisi Lalu lintas wanita yang cantik dan menarik, juga mendapat perhatian dan apresiasi dari anggota Dewan Komisi III itu.

"Saya melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Korlantas Polri dengan menerapkan teknologi penyebaran berita dan informasi berbasis media sosial online seperti twitter, dan juga informasi seputar *traffic* di beberapa stasiun televisi dengan presenter polisi wanita yang berparas menarik, terbukti mampu

merubah *image* berita yang semula dianggap kurang diminati menjadi menarik. Hal ini tentunya perlu mendapat apresiasi," tandas politisi F-PKS tersebut. ■



Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi

Kedatangan rombongan Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Siti Hediati Soeharto secara langsung ini dikarenakan banyaknya keluhan dari masyarakat atas kenaikan harga dan supply bahan pangan menjelang lebaran.

Sebelumnya Komisi IV juga telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, dimana pemerintah menjamin bahwa *supply* bahan pangan sangat besar dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Untuk itu, sekarang Komisi IV DPR RI menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan spesifik ke pasar Kramat Jati, untuk mengecek apakah betul harganya

tidak ter-fluktuasi, kami juga ingin memastikan apakah supply nya cukup," kata Siti Hediati Soeharto kepada Parlemenaria.

Sekedar informasi, berdasarkan hasil tinjauan, rata-rata kenaikan sayur mayur adalah sebesar 20 persen dari harga biasanya. Kenaikan harga memang selalu terjadi namun tidak melonjak terlalu tinggi. Kenaikan harga itu sewaktu-waktu dapat berubah tergantung dari pasokan dan wilayah distribusinya. Tetapi untuk harga cabai mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lainnya yaitu sebesar 100 persen.

Komisi IV pun berpesan kepada pemerintah agar pasokan selalu tetap ada,

"Pokoknya *supply* harus tetap ada karena kan ini rutin ya setiap bulan ramadhan menjelang lebaran dari tahun ke tahun harga selalu naik, pemerintah harus antisipasi dan memperhatikan musim tandurnya agar saat bulan ramadhan tidak kekurangan *supply* nya," terang Siti Hediati Soeharto.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menambahkan, dirinya berharap pemerintah agar selalu berkomunikasi. "Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk terus berkomunikasi agar bahan pangan selalu tersedia, dan saat lebaran harga-harga tidak melonjak terlalu tinggi," tuturnya. ■

Komisi IV Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Karawang

Fenomena kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran (Idul Fitri) adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindarkan bagi rakyat Indonesia.

Intinya sebenarnya bukan naik atau turunnya harga pangan, tetapi bagaimana di tingkat produsen, distributor dan konsumen memiliki tata kelola yang baik, sehingga menguntungkan bagi semua.

" Fenomena ini sebenarnya wajar, dimana ada peningkatan permintaan, maka

harga pun melonjak. Pola yang benar seharusnya, pada tingkat produsen (petani) bisa menikmati hasilnya, namun jangan sampai pada tingkat distributor mengambil untung terlalu besar, sehingga memberatkan konsumen" kata Ketua Tim Kunspek Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat meninjau Pasar Johar di Karawang, Jawa Barat, Senin (20/6).

Dalam pantauannya, lanjut Edhy, harga daging masih relatif normal diangka Rp.110.000, jika dibandingkan dengan bulan Ramadhan tahun lalu harganya Rp.120.000.

"Tinggal kita lihat apakah nanti setelah mendekati lebaran harganya naik atau tidak. Harga ini tentunya masih diatas rata-rata, kita

maunya yg lebih murah dibawah seratus ribu" tekan politisi F-Gerindra ini.

Ia menambahkan, kebutuhan pangan seperti beras cenderung stabil karena permintaan pasar yang berkurang di bulan Ramadhan. Selain itu, harga telur merangkak naik, kalau holtikultura harganya turun daripada tahun yang lalu.

Dalam sidak pasar ini, tambah Edhy, Bupati Karawang juga mengajukan beberapa usulan, termasuk Rumah Potomongan Hewan. Tentu hal ini menjadi penting, karena kita tidak bisa menyerahkan pemotongan hewan begitu saja kepada pihak yang belum terjamin.

Edhy mengharapkan, Kota Karawang jangan cuma menjadi kota Industri saja, melainkan menjadi industri pertanian. Karena bahan pangan yang paling aman produksi sendiri.

"Seperti kita ketahui produk buah dari China, sudah terkontaminasi bahan-bahan pengawet, apakah kita akan serahkan masyarakat kita mengkonsumsi produk-produk bahaya seperti itu. Maka saya menyarankan agar memperkuat basis pangan di Kota Karawang" tutupnya. ■



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau harga pangan di pasar Karawang

Pimpinan DPR RI Sambut Baik Pasar Murah PIA DPR-RI

Ketua DPR RI, Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyambut baik terselenggaranya pasar murah atau Bazar yang diselenggarakan oleh PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI. Hal tersebut terungkap saat menghadiri pembukaan Bazar PIA DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).

Lebih lanjut Akom menyatakan rasa bangganya terhadap PIA yang sudah bekerjasama seluruh fraksi demi terselenggaranya acara tersebut. Sebut saja Ketua panitia yang dipegang oleh Nita Jhon Kennedy Aziz dari fraksi Golkar, Panitia lomba tahfidz Quran dan Adzan oleh Latifah Mahfudz Abdurrahman dari fraksi PKS, dan dirigen atau konduktor yang memimpin nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Puji dari Fraksi PKS, serta ibu-ibu anggota PIA dari fraksi lainnya dengan tugas masing-masing.

"Semua ini menggambarkan kegotongroyongan dan kekompakan seluruh anggota PIA dari sepuluh fraksi

yang ada di DPR RI. Kami berharap acara seperti ini dapat digelar secara rutin terutama menjelang hari raya keagamaan seperti saat ini,"tambah Akom yang diamini oleh Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto.

Sementara itu Ketua umum PIA, Netty Ade Komarudin mengatakan bahwa acara bazar atau pasar murah ini merupakan salah satu kegiatan rutin dari berbagai program sosial yang disusun PIA setiap tahunnya.

Ketua Panitia Bazar atau pasar Murah PIA, Nita Jhon Kennedy Aziz menyatakan, pasar murah kali ini diikuti oleh 100 stand yang terdiri dari sembako, daging, pakaian dan asesoris lainnya. PIA juga menyerahkan



Ketua DPR RI Ade Komarudin di dampingi Wakil Ketua Agus Hermanto membuka Bazar di Gedung DPR RI

bantuan sembako kepada 1300 karyawan yang terdiri dari *cleaning service*, *Office boy* dan *pamdal*. Pada kesempatan itu juga digelar lomba Adzan dan lomba Tahfidz Al Quran yang diikuti oleh keluarga karyawan DPR RI.

Untuk lebih memeriahkan acara juga digelar *Talkshow* Kesehatan, Demo Hjab, "Fashion Show", Shalawat Nabi. ■

DPRD Oku Timur Konsultasikan Berbagai Persoalan

Pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, berkonsultasi seputar pembuatan dan konsistensi penegakan peraturan internalnya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Diterima Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanani, Selasa (21/6), pimpinan dan anggota Bamus DPRD OKU Timur mengkonsultasikan pengaturan jadwal kegiatan rapat hingga bagaimana APBD Perubahan diajukan. DPRD OKU Timur ingin belajar pada DPR RI yang selalu konsisten menegakkan aturan internalnya. "Kuncinya ada di substansi peraturan Tatib," ujar Win, seraya menambahkan, Tatib-lah yang mengikat semua anggota dewan dalam bekerja.

Dipimpin Rio Susanto Wakil Ketua Bamus DPRD OKU Timur, delegasi DPRD ini belajar banyak dari DPR RI bagaimana menyusun dan menegakkan aturan main internal seperti Tatib yang bisa mengikat semua anggota dewan dan



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanani menerima dokumen dari DPRD OKU Timur

mitra kerja. Persoalan pengajuan perubahan anggaran dalam APBD juga dikonsultasikan. DPRD OKU Timur ingin tahu lebih detail apa yang sudah dilakukan DPR RI dan bagaimana Bamus bekerja.

"DPRD masih kebingungan dalam

mengatur jadwal. Sering sekali jadwal yang sudah ditetapkan DPRD-nya itu tidak sinkron dengan jadwal mitra kerjanya. Mereka bertanya bagaimana menyinkronkan jadwal-jadwal itu supaya efektif," ungkap Win usai pertemuan. Kadang para anggota DPRD tak ada di tempat, padahal sudah ada jadwal rapat dengan mitra kerjanya. Aturan sering kali tidak ditaati DPRD-nya sendiri.

Sementara soal APBD perubahan yang juga ditanyakan delegasi, Win menyampaikan, penetapan APBD disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bila ada perubahan APBD, tentu itu sangat bergantung pada perubahan ekonomi makro daerah. Bila sudah ada kesepakatan melakukan perubahan APBD, tentu jadwal pembahasannya pun harus disepakati untuk kemudian ditaati agar program pembangunan di daerah berjalan baik.

"Di UU Keuangan Negara, pengajuan perubahan anggaran itu selama tahun anggaran belum berakhir. Jadi, itu harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah disepakati dan disahkan di DPRD. Ini agar fungsi *check and balances* berjalan, bersinergi, dan saling mendukung antara Pemda dengan DPRD," papar Win. ■

(mb), Foto: Arif/bh

Banggar DPR RI Setujui Postur Sementara APBN-P 2016

Badan Anggaran DPR RI selenggarakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar Kahar Muzakir ini, menyetujui Postur Sementara RAPBNP Tahun 2016 yang diajukan oleh Kementerian Keuangan RI.

“Apakah postur sementara yang diajukan Menkeu dapat kita setujui?” tanya Pimpinan Sidang kepada jajaran Anggota Banggar, Selasa (21/6), seketika dijawab "setuju" dengan jawaban tersebut, Kahar pun mengetuk palu sidang, sebagai pertanda pengesahan usulan Kemenkeu.

Dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Sidang Banggar Nusantara II ini, beberapa anggota Banggar meyoroti tentang dana desa yang tetap dan tidak



Suasana Rapat Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan beserta jajarannya

bertambah, padahal dana yang sudah ada masih dianggap belum ideal.

Menurut Anggota Banggar Achmad Hatari, jika pemerintah konsisten membangun daerah maka dana desa

sebaiknya ada penambahan. "Ini merupakan bentuk keberpihakan kepada daerah," ujar Politisi dari Fraksi Partai NasDem.

Selain dana desa, subsidi pupuk juga menjadi perhatian, mengingat target pemerintah yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan tentang asumsi dasar ekonomi makro dengan indikator pertumbuhan ekonomi APBNP dan RAPBNP 5,3 persen sedangkan kesepakatan Panja A 5,2 persen. Menurut

Menkeu yang berpengaruh besar adalah harga minyak mentah Indonesia dengan kesepakatan Panja A US\$ 40 per barel, sehingga dengan total *cost recovery* 8,0 miliar dolar. ■

(dca,mp), Foto: Andri/bh

Panja RUU Kebudayaan Himpun Masukan ke NTB

Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan budaya yang kompleks dan beraneka, oleh karena itu Komisi X meminta masukan kepada Pemerintah dan masyarakat, tokoh seni budaya Provinsi NTB dalam penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Kebudayaan

Demikian disampaikan Ferdiansyah, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kebudayaan saat bertemu dengan Gubernur NTB M. Zainul Majdi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/6).

"Provinsi NTB dipilih sebagai salah satu daerah kunjungan karena kami memandang provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang kaya akan budaya. RUU ini cukup panjang perjalanannya.

Oleh karena itu, kami membutuhkan masukan terkait materi apa saja yang belum masuk ke dalam RUU tersebut," kata Ferdiansyah, yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB dan beberapa budayawan serta pekerja seni NTB ini mendapat penjelasan awal mengenai latar belakang perumusan RUU tentang Kebudayaan. Kehadiran UU ini diperlukan karena ada kekhawatiran



Ketua Panja RUU tentang Kebudayaan Komisi X DPR RI Ferdiansyah

terjadinya infiltrasi budaya akibat dari efek negatif globalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya infiltrasi budaya yang dapat mengikis kebudayaan nasional.

"Kami ingin memberikan payung hukum dalam usaha pelestarian budaya nasional maupun budaya daerah. Jati diri bangsa terlihat dari bagaimana kita mempertahankan kearifan lokal. Kekuatan bangsa Indonesia hadir karena kebhinekaannya," ungkap Ferdiansyah.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan UU tentang Kebudayaan. "Pertama, definisi kebudayaan nasional harus disepakati bersama. Apa saja cakupan kebudayaan nasional. Jika ada pembatasan, harus ada dasar pembatasan tersebut. Jadi, perlu adanya kejelasan tentang konsep kebudayaan nasional," jelasnya.

"Kedua, penting bagi pemerintah daerah mengetahui posisi kebudayaan daerah di kebudayaan nasional. Banyak sekali inisiatif-inisiatif kebudayaan yang berkembang di daerah perlu diapresiasi oleh kebudayaan nasional," tambah Gubernur.

Ketiga, lanjutnya, Indonesia belum memandang kebudayaan sebagai suatu aset atau kebanggaan. Contoh sederhana, harusnya tayangan di maskapai Indonesia menunjukkan kekayaan budaya di daerah tersebut, sehingga ketika penumpang berkunjung ke daerah tersebut mengetahui bahwa daerah yang akan dikunjungi memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat mengharapkan pentingnya penerapan Bahasa Indonesia karena masih dijumpai banyak istilah asing pada draft RUU Kebudayaan ini. ■

(ny). Foto: Rizka/mr

Rakyat Tanggung Target Pemerintah

Rakyat Indonesia masih dibebani oleh obsesi dan target ekonomi pemerintah. Utang pemerintah yang mencapai Rp4.000 triliun harus ditanggung rakyat lewat pajak. Pemerintah berobsesi, rakyat menanggung.

“ Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal tersebut, Senin (20/6) menyikapi anggaran belanja terkini. “Sumber belanja pemerintah sebesar-besarnya berasal dari pajak yang ditarik dari rakyat. Buktinya, dalam tiga tahun terakhir, besar pajak dari total penerimaan negara rata-rata di atas 80 persen.”

Keringat rakyat terus diperas untuk membiayai belanja pemerintah. Bahkan, defisit keseimbangan primer yang sudah mencapai lebih dari Rp300 triliun dibayar oleh rakyat dari pungutan pajak. Justru subsidi BBM yang jadi hak rakyat malah dicabut dan dipaksa membeli BBM jauh lebih mahal dari harga pasar. Pemerintah ingin dapat uang cash untuk membiayai



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

semua belanja.

Apalagi, sambung politisi Partai Gerinda ini, belanja dan investasi pemerintah kurang menyentuh sektor riil. Akibatnya daya beli masyarakat melemah.

Anggota Dewan Desak DPR RI Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari FPDIP Rieke Diah Pitaloka mendesak DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

“Apalagi RUU ini sudah mendapat dukungan seluruh ormas dan masyarakat, maka RUU PKS yang sudah masuk Prolegnas Prioritas 2016 ini secepatnya diselesaikan,” kata Rieke Diah Pitaloka saat diskusi Forum Legislasi “RUU PKS” bersama Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherawati dan Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/06).

Ia menegaskan, secara substansi RUU ini sudah mendapat dukungan semua ormas termasuk Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komnas HAM, ormas keagamaan dan lain-lain. Pada prinsipnya RUU PKS ini harus memberi efek jera.

“Bahwa kekerasan seksual yang terus meningkat saat ini membutuhkan perangkat hukum yang bersifat khusus atau *lex specialist*. Karena UU Pidana, UU KDRT dan lainnya tidak memadai. Sementara kekerasan seksual ini seperti ‘gunung es’ yang tak bisa diselesaikan secara damai di kepolisian,” paparnya.



Anggota Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka

Korban pun bukan saja perempuan dan anak-anak, tegas Anggota Komisi VI DPR RI ini, tapi juga lelaki dan orang dewasa. Jadi, RUU ini untuk semua, bukan saja perempuan.

Mengingat masalah ini kompleks, apakah RUU ini akan dibahas oleh Pansus besar DPR RI atau lintas komisi, Rieke menegaskan, RUU PKS ini harus segera diputuskan.

“Ujungnya, pertumbuhan yang ditargetkan 5,3% tidak akan tercapai. Bahkan, pertumbuhan yang sifatnya konsumtif itu hanya akan dinikmati oleh 20% orang terkaya. Sedang, 80% orang sisanya rentan tertinggal.”

Menurutnya, posisi ekonomi konsumtif seperti itu tidak akan menggerakkan ekonomi domestik yang menghasilkan nilai tambah. Sebaliknya, pasar domestik hanya jadi arena jualan barang-barang asing. “Dampaknya, APBN kita akan terus defisit. Bahkan, defisitnya bisa melampaui 3% yang disyaratkan UU Keuangan Negara,” ungkap Heri.

Ketika belanja pemerintah tidak diarahkan untuk sektor riil, seperti pertanian,

perikanan, UMKM, maka ekonomi akan terus tergerus yang menciptakan 1% orang yang menguasai 50% kekayaan nasional. Dan celakanya, semua dibiayai oleh rakyat yang sudah berlelah-lelah menghasilkan devisa yang terus menipis.

Melihat semua fakta negatif ini, politisi dari dapil Jabar IV itu kemudian menyarankan agar utang dikelola dengan hati-hati dan keseimbangan primer yang makin lebar harus disetop, bila pemerintah tidak ingin bergantung pada utang. Belanja dan investasi juga harus diarahkan pada sektor riil dan produktif. Dan infrastruktur perlu dibangun lewat skema *public-private partnership* yang pro kepentingan rakyat. ■

(mb), Foto: Arif/br

Sementara menurut data Komnas Perempuan, kata Sri Nurherawati, sebanyak 83 % korban perempuan menempuh jalur hukum. Tapi, 50 % berhenti di kepolisian, 40% damai dengan mediasi, dan hanya 10% berlanjut ke pengadilan. “Sebanyak 35 perempuan setiap hari menjadi korban, namun sulit ketika bersidang di pengadilan karena selalu dibebani dengan bukti, dimana kaum perempuan sulit mengumpulkan bukti (Ps 184 KUHP). Yang ada hanya visum, sehingga banyak kasus tidak berlanjut di pengadilan,” tambahnya.

Karena itu kata Sri Nurherawati dibutuhkan keberanian untuk melakukan terobosan hukum, melihat kasus ini membuka babak baru terkait pelanggaran HAM, harkat, dan martabat kemanusiaan, dan dampaknya yang luar biasa, maka RUU ini bersifat darurat atau *lex specialist*. Sehingga dibutuhkan penegak hukum yang khusus. “Jaksa, hakim, dan polisi yang khusus, yang mendapatkan pendidikan HAM, gender, dan PKS sendiri,” jelasnya.

Khusus untuk korban cacat permanen, selama hidupnya selama ini kata Sri Nurherawati, tidak ada yang bertanggung jawab. Untuk itu, jika pelaku tidak mampu, maka negara yang harus bertanggung jawab.

Dalam kesempatan yang sama Arist Merdeka Sirait, menyatakan yang terpenting adalah pidana pokoknya yang harus jelas, karena yang ada masih lemah. Padahal, kekerasan seksual ini bersifat darurat (*extra ordinary crime*). Hukumannya pun harus membuat jera; minimal 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati (Ps 340). “Jadi, RUU ini harus komprehensif, visioner untuk melindungi perempuan, anak-anak, dan dewasa, serta memberi sanksi bagi predator-predator seksual,” katanya. ■

(sc), Foto: Arif/br

BKSAP Serukan Keterwakilan Perempuan Dalam Perdagangan Internasional

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf meminta kepada organisasi parlemen sedunia atau Inter Parliamentary Union (IPU) untuk mendesak *World Trade Organization* (WTO) agar memberikan porsi lebih bagi keterwakilan perempuan baik dalam proses negosiasi maupun dalam kesepakatan yang dihasilkan.



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf berpidato dalam acara WTO

“WTO selama ini berasumsi bahwa perdagangan dipandang sebagai sesuatu yang *gender neutral* sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung *gender blind*,” seru Nurhayati saat

mengikuti *Parliamentary Conference on the World Trade Organization* yang berlangsung pada tanggal 13-14 Juni 2016 di Jenewa, Swiss.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 58 parlemen dan organisasi internasional ini, ia menyerukan agar isu gender ditempatkan sebagai konsideran saat juru runding WTO melakukan proses negosiasi sehingga keputusan yang diratifikasi memberikan dampak yang seimbang bagi setiap komponen masyarakat.

Selain itu, legislator dari Dapil Jatim V ini menambahkan, fokus gender juga semestinya disematkan pada pengembangan kewirausahaan pengusaha perempuan berbasis Usaha Kecil

Menengah (UKM).

"Dengan terakomodasinya isu gender, diharapkan perdagangan dapat memberikan efek kemajuan sosial yang meluas," imbuhnya.

Ia mengatakan, seperti yang dilansir *World Bank* pada 2007 bahwa "Gender Equality is smart economics." Artinya, dengan meningkatkan partisipasi pasar tenaga kerja perempuan dan akses perempuan terhadap kontrol sumber daya ekonomi secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Sebelumnya, politisi Demokrat ini pernah menyerukan hal serupa dalam pertemuan *Steering Committee* persiapan Konferensi PCWTO yang diadakan pada Februari 2016 lalu. Seruannya tersebut kemudian diterima dan ditindaklanjuti sebagai salah satu agenda dan narasumber dalam Konferensi *Trade as Vehicle of Social Progress: the Gender Perspective*.

Selain Ketua BKSAP sebagai ketua delegasi, komposisi delegasi DPR RI juga terdiri dari Wakil Ketua BKSAP Saifullah Tamliha dari Fraksi PPP dan anggota BKSAP Jon Erizal dari Fraksi PAN. ■

(amr,mp) foto: dok-bksap/br

Paripurna DPR RI Sahkan Perubahan Tatib Kunjungan Kerja

Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Taufik Kurniawan mengesahkan laporan Badan Legislasi terkait perubahan kedua atas peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib tentang kunjungan kerja.

“Apakah perubahan kedua atas peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib ini dapat disetujui?” tanya Taufik Kurniawan di Sidang Paripurna DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/06), yang disambut koor "setuju" para anggota Dewan yang hadir dalam sidang tersebut.

Adapun, materi atas perubahan terkait kunjungan kerja ada di pasal 211 dibacakan oleh Wakil Ketua Baleg, Dossy Iskandar Prasetyo dimana kunjungan kerja yang



Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar menyampaikan laporan tentang tatib kunker

sebelumnya dilakukan pada masa reses, kini dapat dilakukan pada masa reses dan pada masa sidang

"Kunjungan kerja dilakukan pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri 5 kali dalam 1 tahun sidang," ujar Dossy dari Fraksi Hanura.

Perubahan selanjutnya, lanjut dia, kunjungan kerja pada masa reses atau

pada masa sidang DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri 1 kali 1 tahun dengan waktu paling lama 5 hari.

Kemudian, kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 kali setiap 2 bulan atau 6 kali dalam 1

tahun dengan waktu paling lama 3 hari.

Berdasarkan tata tertib sebelumnya, kunjungan kerja perseorangan hanya boleh dilakukan pada masa reses. Namun, setelah perubahan kedua tatib DPR RI, setiap anggota diperbolehkan melakukan kunjungan kerja untuk menemui konstituennya pada masa persidangan. Ini dilakukan mengingat panjangnya masa persidangan akibat dari pengurangan masa reses. ■

(rnm.np), Foto: Krens/hr

RUU Sistem Perbukuan Mengatur Perbukuan Secara Komprehensif

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan merupakan usaha negara untuk menyusun kebijakan dan sistem perbukuan secara komprehensif sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan buku dengan mudah serta tanpa diskriminasi.

Hal tersebut dikatakannya saat Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Prov. Jatim Syaifullah Yusuf, Ikapi Jatim, Asosiasi Toko Buku Jatim, dan Komunitas Penulis, di Surabaya, Jum'at (17/6).

"Kedatangan kami juga sekaligus untuk mencari masukan dari seluruh stakeholder. Dan tentunya diharapkan dapat membuat RUU Sistem Perbukuan semakin baik. Kami memahami RUU ini akan menjadi pijakan kita didalam sistem perbukuan yang sangat dibutuhkan oleh semua yang terkait," kata Esti.

Dalam kesempatan ini, Esti menerangkan, bahwa terdapat pokok-pokok pengaturan didalam RUU Sistem Perbukuan ini, meliputi, penulisan naskah buku yang memiliki isi atau konten yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian Indonesia, kemudahan mengakses buku berkualitas dengan harga murah, "Karena kita sering mendapat masukan bahwa harga buku yang lebih banyak tidak terjangkau," ujarnya.

Kemudian, lanjut Esti, berkaitan dengan perlindungan hak cipta atau hak ekonomi insan perbukuan, "Insan perbukuan tentunya disitu ada penulis, penterjemah dan lainnya," tambahnya.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meminta masukan perihal RUU Sistem Perbukuan dengan Pemkot Jatim beserta Komunitas Buku

Selanjutnya jaminan bahan baku kertas dan tinta dengan harga murah, penentuan HET buku dan penghapusan pajak pertambahan nilai untuk buku. "RUU Sistem Perbukuan ini menjadi salah satu yang besar harapannya," pungkas Esti.

Di sini Esti pun menginformasikan, bahwa kita mempunyai pekerjaan rumah yang tidak ringan, dimana minat baca kita (orang Indonesia-red) pada saat ini dalam posisi no. 60 dari 61 negara, "Oleh karena itulah diharapkan dengan nanti kita atur dengan baik melalui Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan, beberapa kendala mengenai minat baca atau literasi, bisa menjadi salah satu pintu untuk diselesaikan," harap politisi dari PDIP ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim

Syaifullah Yusuf mengatakan satu hal yang perlu diantisipasi itu adalah perkembangan teknologi, "Kita bayangkan makin hari anak-anak itu kesekolah tidak bawa buku lagi, yang dibawa itu laptop. Kedepan paperless itu akan terjadi. Ini menjadi tantangan," terang Syaifullah yang akrab disapa Gus Ipul.

Selanjutnya menurut Gus Ipul, yang penting dalam RUU Sistem Perbukuan adalah pemberian sanksi terhadap kekeliruan isi buku atau konten, "Kekeliruan isi konten yang sudah tertulis itu seterusnya tidak akan bisa dihapus, dan kekeliruannya itu pun akan sampai kepada anak cucu. Buku cukup punya dampak serius oleh karena itu sanksinya harus cukup besar," tegasnya.

Sekedar informasi, RUU Sistem Perbukuan merupakan salah satu draft prolegnas 2016 yang berasal dari inisiatif DPR RI. RUU Sistem Perbukuan Komisi X DPR RI saat ini sedang dalam pembahasan tingkat I dengan pemerintah, dimana pemerintah mengajukan 589 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pengajuan DIM oleh pemerintah berimplikasi adanya perubahan dalam pokok-pokok pengaturan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI diikuti pula oleh Junico BP Siahaan (F-PDIP), Popong Otje Djundjungan (F-PG), Moreno Soeprapto (F-Gerindra), Jefirstson Riwu Kore (F-PD), Laila istiana (F-PAN), Lathifa Shohib (F-PKB), SY Anas Thahir (F-PPP), Kresna Dewanata Phrosakh (F-Nasdem). ■

(nt), Foto: Nita/mr

Ikapi Sumut Ingin BSNP Ada di Setiap Daerah

Kunjungan kerja Panja Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) ke Sumatera Utara, mendapat banyak masukan untuk menjadi bahan pembahasan RUU Sisbuk di Komisi X DPR RI. Salah satunya terkait keinginan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Sumut, untuk adanya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di setiap daerah, untuk memudahkan legalisasi penerbitan buku.

Demikian ditekankan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, usai memimpin kunjungan Panja RUU Sisbuk ke Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (17/06). Kehadiran Panja RUU Sisbuk ini diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Hasban Ritonga, dan segenap SKPD terkait pendidikan dan perbukuan.

"Selama ini Ikapi merasa sistem perbukuan ini tidak pernah diatur secara jelas dan berkeadilan. Dan tidak ada semangat untuk menata buku itu dengan baik, sehingga mereka sebagai penerbit, merasa betul-betul tidak diakomodir," kata Sutan.

Misalnya, tambah Sutan, para penulis dan penerbit menerbitkan buku yang memiliki konten lokal, dan kemudian diajukan ke BSNP pusat, untuk mendapat pengesahan atau legalisasi cetak dan edar. Namun kemudian dalam perjalanannya, buku dinilai BSNP tidak lulus atau lulus bersyarat. Sehingga buku tidak dapat diedarkan. Padahal buku itu bertujuan hanya untuk diedarkan di daerah, bukan nasional.

"Berarti ini kearifan lokal dan konten lokal tidak bisa diakomodir, padahal sebenarnya yang namanya buku itu kan kita harus mengakomodir semua aspirasi insan perbukuan. Sehingga, mereka menginginkan BSNP ini jangan hanya ada di pusat. Harus ada di daerah, sehingga dengan demikian penerbit daerah juga bisa mengemukakan bahwa mereka mempunyai konten lokal," papar Sutan.

Politisi F-Gerindra itu mengapresiasi usulan Ikapi tersebut. Menurutnya, dengan adanya BSNP di daerah, buku yang memiliki kandungan kearifan lokal, untuk beredar di daerah itu, dapat dilegalisasi, dan mendapat predikat lulus cetak dan edar. Ikapi menilai, keinginan penerbit di daerah tidak diakomodir BSNP pusat.

"Ikapi merasa, tidak diberikan kepercayaan apabila mereka mengeluarkan



Suasana rapat Komisi X DPR RI dengan Pemkot Sumut

buku yang berisi kearifan dan konten lokal. Sehingga penerbit tidak menerbitkan buku. Ini berimbas pada penurunan jumlah penerbit buku di Sumut, dari 34 penerbit, hingga kini menjadi kurang dari 20 penerbit," jelas Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini yakin, RUU Sisbuk akan mengakomodir kepentingan-kepentingan insan perbukuan, dalam hal ini yang tergabung dalam Ikapi dan penerbit, sehingga ke depannya mereka punya semangat menulis dan menerbitkan buku.

"Ini semua menjadi input yang sangat berharga. Panja RUU Sisbuk Komisi X akan segera mengumpulkan semua input dari setiap daerah. Masukan yang kita dapat dari Ikapi dan Pemprov Sumut, ini semua akan kita jadikan rekomendasi dalam pembahasan DIM kita dengan Pemerintah," pasti Sutan, sembari mengatakan, target penyelesaian RUU Sisbuk dalam 2 kali Masa Persidangan mendatang.

Sebelumnya, perwakilan Ikapi Sumut, Rimson Tambun mengatakan bahwa pihaknya belum merasakan hadirnya BSNP di daerah. Kalau ada BSNP ada di pusat, berarti harus ada perwakilan BSNP di daerah, yang merupakan perpanjangan tangan dari BSNP pusat.

"Selama ini Pemerintah memusatkan kewenangan di Jakarta. Kami mohon pendistribusian pengesahan buku jangan hanya terpusat di Jakarta, harus ada di tiap daerah atau provinsi. Kami juga tidak yakin dengan kemampuan BSNP untuk

mengesahkan buku dari seluruh provinsi," tegas Rimson.

Ia mengaku, pernah beberapa kali mengajukan pengesahan buku ke BSNP, namun selalu mendapat predikat tidak lulus. Menurutnya, dengan adanya BSNP di daerah, dengan cepat mengajukan buku untuk dilegalisasi, dan dengan biaya yang lebih murah.

"Penulis sekarang sudah jenuh menulis, karena penerbit kurang menghargai penulisnya. Karena buku sulit dijual. Mungkin alasannya karena

buku belum disahkan oleh BSNP pusat, karena kami mempertimbangkan waktu dan biaya untuk pengesahan ke Jakarta," keluh Rimson.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra/Dapil Lampung), Sri Meliyana (F-Gerindra/Dapil Sumsel), Yayuk Basuki (F-PAN/Dapil Jateng), dan Zainul Arifin Noor (F-PKB/Dapil Kalsel). ■

Foto: Sofyan/br

“Perkenankan saya sedikit meresonansi salah satu surat pembaca di koran nasional yang terusik dengan penggunaan bahasa asing dalam penamaan salah satu terminal baru di Soetta,” ungkapnya saat melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/06).

Menurutnya, penggunaan kata 'Ultimate' akan menjadi rancu dalam pelafalannya, apakah akan dibaca sesuai pelafalan bahasa Indonesia ataukah dibaca sesuai dengan bahasa aslinya. "Yang mana yang menjadi standar, sebab kalau ini bahasa Indonesia harus dibaca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar," ungkap politisi PKS dari Dapil I Sumsel ini.

Ia menegaskan, bahasa negara yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di

Paripurna DPR RI Sahkan Perubahan Prolegnas 2016

DPR RI bersama Pemerintah bersepakat mengesahkan Perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2016 dan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. Sebanyak 10 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan satu diantaranya masuk Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.

“ Sesuai dengan kesepakatan pada awal penyusunan awal RUU Prioritas Tahun 2016 sebanyak 40 RUU, DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk melanjutkan usulan perubahan prolegnas tahun 2016 apabila ada RUU yang telah disetujui menjadi UU dan sesuai dengan evaluasi pelaksanaan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo saat membacakan laporan hasil rapat Badan Legislasi di depan paripurna, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/06).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Firman menyebutkan, terdapat 10 RUU terdiri dari 5 RUU usul inisiatif DPR RI yakni RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Perkelapasawitan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo dan Pimpinan DPR RI

tentang Bank Indonesia dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan 5 RUU lainnya merupakan usulan pemerintah adalah RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika dan RUU tentang

Kepalangmerahan.

"Ke-10 RUU tersebut akan mengisi slot 5 RUU yang telah selesai dibahas dan 20 RUU dalam pembicaraan tingkat 1 yang akan selesai dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Selanjutnya, politisi Golkar ini menambahkan, dari ke-40 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 terdapat 7 RUU yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) yaitu 3 RUU adalah inisiatif DPR RI, 2 RUU inisiatif pemerintah, dan 2 RUU kumulatif terbuka.

Sementara itu, 20 RUU dalam tahap pembahasan tingkat 1 dan 1 RUU sedang menunggu surat presiden (surpres) untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat 1, 2 RUU dalam tahap harmonisasi di badan legislasi, 9 RUU dalam tahap penyusunan naskah akademik di komisi, 2 RUU dalam tahap penyusunan naskah akademik di pemerintah, dan 1 RUU menunggu keputusan rapat paripurna DPR RI. ■

(ann.mp), Foto: Krenabr

Legislatur Kritik Penggunaan kata Terminal 3 Ultimate

Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal mengkritik penggunaan bahasa asing terhadap salah satu aset negara, yakni penamaan terminal baru di Bandara International Soekarno-Hatta, Terminal 3 Ultimate.

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

"Saya ingin mengingatkan bahwa kita sudah mempunyai UU nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa bersamaan juga dengan bendera dan simbol nasional lainnya," tegasnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan, terdapat pasal lainnya yang menegaskan bahwa dokumen resmi negara seperti surat keputusan, identitas diri, transaksi dan sebagainya harus menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam UU Dasar Tahun 1945 Pasal 36 pun menyebutkan bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

"Identitas negara dan bangsa ditunjukkan dengan bahasanya, bagaimana



Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal

kalau bandara kita nanti menjadi bagian dari dokumen negara sedangkan memakai bahasa asing, ini jelas pelanggaran," ia menandaskan. ■

(ann.mp), Foto: Azka/br

BURT DPR RI Dorong RS Siloam Medan Tingkatkan Pelayanan

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Hasrul Azwar mengharapkan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas yang diberikan RS Siloam, Medan kepada anggota DPR RI dan keluarganya. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Direksi RS Siloam, Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/6).

“Kedatangan Tim Kunjungan Kerja BURT ke RS Siloam ini adalah untuk meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya di seluruh Indonesia serta pelaksanaan Program Indonesia Sehat yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Masih adanya rumah sakit yang terlalu berorientasi pada bisnis dan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat umum terus menjadi keprihatinan kita bersama. DPR RI mengharapkan RS Siloam Dhirga Surya dapat segera meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada anggota DPR RI beserta keluarganya,” kata Hasrul.

Setelah melihat langsung kondisi rumah sakit bersama seluruh Tim BURT yang terdiri Pimpinan dan beberapa anggota, didapati bahwa RS Siloam Medan telah berupaya memberikan pelayanan terbaik di usianya yang tergolong muda, walaupun masih ada kekurangan di beberapa aspek pelayanan.

Anggota BURT DPR RI Rendy Lamadjido dan Ansory Siregar mengharapkan RS Siloam segera bersiap diri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan baik kepada Anggota DPR RI sesuai standar yang ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2014. Hal ini disampaikan mengingat banyak kekecewaan yang dialami Anggota DPR RI beserta keluarga mulai dari pasien datang hingga pasien ke luar dari rumah sakit karena masih ada rumah sakit yang terlalu *profit-oriented*.

Selain aspek teknis pendukung yang dapat membantu kelancaran pelayanan terhadap pasien, Anggota BURT Irma Suryani dan Joko Purwanto juga mengingatkan akan pentingnya pengembangan potensi dan kedisiplinan



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau RS Siloam di Medan

SDM tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, apoteker, sampai tenaga administratif di rumah sakit.

"Jangan sampai RS di Indonesia, kalah humanis-nya dengan rumah sakit negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia.

Mereka mengharapkan SDM yang menjadi ujung tombak pelayanan di RS dapat terus mengembangkan hubungan humanis dengan masyarakat agar terbangun rasa *trust* dari warga sekitar untuk kembali ke RS di Indonesia karena ada keyakinan dokter di Indonesia melayani dengan hati.

Melalui Kunjungan Kerja ke RS Siloam yang merupakan salah satu RS Provider ini diharapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarga dapat lebih

tersosialisasi dengan baik. Selain itu, PT Asuransi Jasindo melalui RS Providernya diharapkan dapat memastikan bahwa Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan. ■

(insan.mpr). Foto: Inanah

Komisi III Jaring Masukan dari Tiga Lembaga

Komisi III DPR RI menjaring masukan dari PPATK Pusat Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kempolnas) terkait pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri baru oleh Presiden Joko Widodo.

“Pertemuan dengan tiga lembaga negara ini tujuan utamanya untuk meminta masukan berupa rekam jejak Tito. Dari PPATK berupa rekam jejak dari sisi keuangannya. Sementara dari KPK kami ingin meminta keterangan apakah sejauh ini ada pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada calon Kapolri tersebut,” jelas Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo kepada wartawan sesaat sebelum dimulainya

RDP dengan Kempolnas, PPATK dan KPK, di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, Selasa (21/6).

Sedangkan dari pihak Kempolnas, lanjut pria yang akrab disapa Bamsuet, pihaknya ingin mengetahui *track record* atau rekam jejak lulusan Akpol tahun 1987 itu selama bertugas di Polri. Termasuk juga adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan semasa menjabat sebagai Kapolda Papua.

RUU Sisbuk Akomodir Kebutuhan Masyarakat Dapatkan Buku

Buku adalah jendela dunia, menjadi pepatah yang tak asing lagi. Buku juga menjadi sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa.

Hal inilah yang melandasi DPR RI, khususnya Komisi X DPR RI dan Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perbukuan nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengatakan, melalui penyusunan RUU Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) diharapkan masyarakat dengan mudah memanfaatkan buku untuk mengembangkan ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kebijakan dan sistem perbukuan yang ada di Indonesia belum tertata dengan baik dan masih menyisakan beberapa permasalahan seperti masalah harga, jenis, kualitas, distribusi dan pemanfaatan buku," kata Sutan, usai memimpin kunjungan kerja Panja RUU Sisbuk Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumut, Jumat (17/06).



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Sutan memberikan ilustrasi, masalah ketersediaan kertas yang masih sulit di akses oleh penerbit dan percetakan, akibatnya harga buku di Indonesia masih mahal sehingga sulit di akses masyarakat.

"Mahalnya harga buku ini membuat budaya membaca bangsa kita menjadi

sangat rendah, jadi ini salah faktor mengapa pendidikan kita sulit mengejar negara lain," tegas Sutan.

Padahal, imbuh politisi F-Gerindra itu, di negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris, Jepang bahkan di India harga kertas untuk buku di subsidi oleh pemerintah sehingga harga buku disana bisa murah dan mampu dijangkau oleh masyarakat.

"Salah satu yang kita harapkan dari RUU ini adalah bagaimana buku itu murah dan mudah didapat. Kalau buku mahal dan tak tersedia, kita akan ketinggalan dari negara-negara lain, karena saya prihatin melihat kondisi kita dalam minat baca, dari 61 negara, kita ada di nomor 60. Ini berarti kan ada yang salah," analisa Sutan.

Sutan berharap, dengan tersedianya buku secara murah dan mudah didapat, dengan sendirinya akan dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

"Begitu kita buat analisisnya, ternyata dengan jumlah penduduk kita yang ada dengan ketersediaan buku, dapat dikatakan 1 buku untuk 12 orang. Bayangkan, kalau sudah dibaca 5 orang, maka buku itu sudah kumal dan lecek," imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini memastikan, RUU ini bersifat general dan mengakomodir dari seluruh keinginan insan perbukuan. Terkait dengan target penyelesaian RUU ini, Sutan berharap akan selesai akhir September 2016 ini, tapi semuanya tergantung proses pembahasan di dewan dan kelengkapan bahan untuk tahap harmonisasi dan finalisasi.

"Karena kita menginginkan UU ini menjadi ekosistem pendidikan tempat tumbuh kembangnya minat baca masyarakat," tutup Sutan.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra/Dapil Lampung), Sri Meliyana (F-Gerindra/Dapil Sumsel), Yayuk Basuki (F-PAN/Dapil Jateng), dan Zainul Arifin Noor (F-PKB/Dapil Kalsel). ■

(Ayo), Foto: Anand/br



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo di dampingi Wakil Ketua Desmond J. Mahesa

"Kami tidak hanya meminta masukan dari ketiga lembaga tersebut. Namun kami juga berharap masukan dari masyarakat umum, ormas tentang Komjen Pol. Tito Karnavian ini. Ini semua sebenarnya merupakan bagian dari Fit and Propertest," tambah Politisi dari Fraksi Partai Golkar.

Usai menjaring masukan dari ketiga lembaga ini, direncanakan Komisi III DPR RI akan mengunjungi kediaman Tito Karnavian pada Rabu (22/6) dan gelar Fit and Propertest pada hari berikutnya. ■

(Ayo), Foto: Anand/br

Komisi VI dan Menkeu Sepakati Anggaran untuk BUMN

Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN RI menyimpulkan realisasi anggaran dan pemotongan anggaran tahun 2016. Dalam rapat ini Kementerian BUMN diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, berdasar pada Surat Presiden No R-39/PRES/06/2016 perihal Penunjukan Sementara Waktu.

Kesepahaman ini terjadi setelah terselenggaranya rapat kerja antara dua institusi tersebut, yang dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno. "Komisi VI DPR RI dapat



Ketua Komisi VI Teguh Juwarno

memahami realisasi anggaran Kementerian BUMN sampai dengan 31 Mei 2016," tutur Teguh membacakan kesimpulan di ruang sidang Komisi VI, Kamis (16/6).

Realisasi anggaran di Kementerian BUMN adalah sebesar Rp.50.665.881.818,- atau 14,69 persen dari pagu anggaran kementerian BUMN tahun 2016 sebesar Rp.345.000.000.000. Selain itu Komisi VI juga dapat memahami penghematan dan pemotongan anggaran kementerian BUMN pada 2016 sebesar

Rp.95.077.332.900,- atau 27,56 persen dari pagu awal sebesar Rp.345.000.000.000.

Setelah dilakukan evaluasi, penghematan anggaran tersebut dipotong dari kegiatan sisa lelang, perjalanan dinas, kegiatan rapat di luar kantor, kegiatan lelang yang belum kontrak, dan renovasi gedung. Maka berdasarkan instruksi Presiden RI No 4 tahun 2016, sehingga anggaran Kementerian BUMN tahun 2016 menjadi Rp. 249.922.667.100,-

Menkeu yang mewakili Menteri BUMN dapat menerima kesepakatan itu, dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik kepada seluruh Anggota Dewan dari Komisi VI. Dalam rapat ini juga dipaparkan bahwa tugas pokok Kementerian BUMN adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu presiden. ■

(foto), Foto: Jakarta/rr

Legislator Minta KPU Evaluasi Survey Pemilih

Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji meminta kepada KPU untuk mengevaluasi keberadaan survey pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal itu disampaikan saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, (16/06).

“KPU saya kira perlu evaluasi keberadaan lembaga survey pemilih saat berlangsungnya pemilihan umum, pasalnya hal itu dapat memengaruhi opini publik terhadap salah satu calon,” terangnya.

Sehingga masalah ini perlu menjadi perhatian KPU agar ke depan penyelenggaraan pemilu bisa menjadi lebih adil dan masyarakat bisa memilih calon berdasarkan profesionalitas.

Dalam rapat yang dimaksudkan untuk membahas R-APBN-P 2017, Komisi II menerima penjelasan KPU, Bawaslu dan Ombudsman RI terhadap pagu indikatif tahun 2017 yakni Rp 1931.150.758.000,-

untuk KPU, Rp 485.034.246.000,- untuk Bawaslu dan Rp 131.221.531.000,- untuk Ombudsman.

Terkait usulan tambahan anggaran tahun 2017 untuk KPU sebesar Rp 1.025.020.866.000,00 untuk Bawaslu sebesar Rp 37.571.762.000,00 dan untuk Ombudsman sebesar Rp 212.776.469.000,00. Komisi II juga meminta KPU, Bawaslu dan Ombudsman untuk menyampaikan alokasi anggaran secara rinci terhadap Komisi II.

"Selambat-lambatnya pada pekan kedua bulan Juli 2016, untuk selanjutnya dibahas secara rinci lebih dalam pada RDP yang akan datang," ujar Al Muzzammil



Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji

Yusuf selaku ketua rapat.

Selain itu, Komisi II juga meminta KPU, Bawaslu dan ORI untuk segera menyampaikan laporan rincian hasil pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 berjalan ke Komisi II yang akan digunakan sebagai materi pendukung dalam pembahasan berikutnya. ■

(foto), Foto: Rumi/br



Anggota Komisi III DPR RI saat berkunjung ke rumah dinas Calon Kapolri Tito Karnavian

Komisi III Apresiasi Kesederhanaan Keluarga Tito Karnavian

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo bersama anggota lainnya mengunjungi kediaman Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian. Kunjungan ini merupakan rangkaian kedua *fit and proper test* calon tunggal Kapolri baru yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

“Kedatangan Komisi III ingin mendalami dan merasakan suasana apakah calon kita ini didukung oleh keluarganya menjadi Kapolri, itu yang paling penting,” ungkap Bambang usai melakukan sesi tanya-jawab di kediaman Tito Karnavian di Komplek Dinas Polri, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/06).

Hal serupa disampaikan anggota Komisi III Herman Hery (F-PDIP), mengunjungi kediaman calon merupakan tradisi Komisi III menjelang *fit and proper test* untuk melihat kehidupan pribadi calon Kapolri. Ia juga memberikan apresiasi kepada keluarga Tito.

“Jadi saya pribadi memberikan apresiasi, keluarga yang sangat sakinah. Pak Tito dan istri luar biasa, mereka keluarga jenderal yang boleh dikatakan cukup sederhana. Mereka mengelola kehidupan pribadi mereka dengan cara

yang sangat efisien, misalnya rumah pribadi disewakan bisa buat pendidikan anak-anak,” ujar Herman.

Di saat yang bersamaan, Bambang juga menyampaikan hasil pertemuan Komisi III PPA TK Pusat Analisis Transaksi Keuangan, KPK dan Kopolnas beberapa waktu, terkait pencalonan tunggal Tito sebagai Kapolri. Dijelaskannya, hal yang menjadi pertimbangan KPK dalam melakukan penelusuran yakni adanya laporan masyarakat dan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

“KPK menyatakan *clean and clear*, laporan Pak Tito tidak ada yang aneh, semua wajar dan memang kita buktikan. Kita bisa menangkap apakah calon ini hidup dalam suasana *glamour* atau sederhana. Ternyata sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK,” ujar politisi Golkar ini.

“Kami lihat laporan sementara, pandangan mata kami dari kediaman beliau, intinya bahwa kita melihat apa yang diucapkan dan apa yang ditunjukkan Pak Tito sesuai dengan keadaan rumahnya, kami disambut dengan hangat, beliau dan istrinya. Mereka juga menunjukkan hubungan yang sangat harmonis, mudah-mudahan keharmonisan rumah tangga ini bisa lebih mendukung Pak Tito sebagai Kapolri,” kata Bambang.

Selain mendalami kehidupan pribadi Tito dan keluarga, Komisi III juga mendalami visi dan misi yang akan dilakukan Tito bersama istri sebagai pimpinan Bhayangkara dan Bhayangkari ke depannya. “Tentunya sebagai bapak dan ibu Bhayangkara, pasangan ini bergandengan tangan melakukan reformasi di tubuh kepolisian, paling tidak menyentuh prajurit yang ada di lini paling bawah,” imbuh Herman. ■



BERITA BERGAMBAR



Ketua DPR RI Ade Komarudin di dampingi Bupati Bogor Nurhayanti menyerahkan Traktor untuk petani di Kantor Bupati Bogor, Kamis (23/6) Foto : Arief/hr



Tim Kunspek Pansus Angket Pelindo II dipimpin Rieke Diah Pitaloka tinjau Belawan International Container Terminal (BICT) Medan, Rabu (22/6) Foto: Naefuroji/hr



Pansus Pelindo II himpun masukan pengelolaan pelabuhan ke Pelindo IV Makassar, Sulse (22/6) Foto : Agung/hr



Pusat Perancangan UU, Badan Keahlian Dewan dan Biro Persidangan I, dipimpin oleh Ka.BKD Johnson Rajagukguk, SH, M.Hum Melaksanakan kegiatan uji konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan, di DPRD Kota Batam dan Universitas Internasional Batam, Rabu-Jumat (22-24/6) Foto : Istimewa



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI